

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah atau sarana untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi yang berada di ranah pemerintahan memiliki tujuan nasional, tercapainya tujuan organisasi yang berada di pemerintahan di dukung oleh tugas dan fungsinya masing-masing untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien dan optimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam organisasi yang menjadi perencanaan setiap aktivitas organisasi.

Peran pegawai sebagai aparatur negara yang melaksanakan tugas organisasi di lingkungan pemerintahan. merupakan faktor penting dalam setiap instansi pemerintah, terutama untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini karena berhasil tidaknya suatu instansi dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia selaku pelaksana kegiatan. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut tentunya sebuah organisasi diperlukan efektivitas kerja yang baik dari aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif.

Efektivitas kerja yang baik di dalam organisasi publik dapat membuat pencapaian tujuan organisasi lebih cepat sedangkan efektivitas kerja pegawai buruk dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama efektivitas kerja pegawai adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai

dengan yang telah ditetapkan. Jika pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawai lebih baik dari yang ditetapkan maka pegawai tersebut tergolong sebagai pegawai yang efektif.

Efektivitas kerja merupakan sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawai. Bagi organisasi publik itu sendiri dengan adanya efektivitas kerja yang optimal, maka diketahui seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Adapun bagi pegawai itu sendiri akan diperoleh untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, peningkatan mutu hasil, memberdayakan sumber daya manusia yang ada dapat dilakukan dengan memberikan hak-haknya sebagai pegawai.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sambas. Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2001, mengingat penataan kelembagaannya berpedoman Peraturan

Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 dipandang telah tidak sesuai lagi dan perlu dibenahi dan ditata kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003.

2. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 32).

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Fasilitas rapat anggota DPRD
2. Pelaksanaan rumah tangga DPRD Kabupaten
3. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh DPRD.

Memiliki tugas pokok dan fungsi yang kompleks dan penting didalam organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas tentunya diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan didalam organisasi dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang telah ditetapkan organisasi agar memberikan pelayanan yang baik. Hal tersebut tentunya dapat dicapai apabila organisasi memiliki tingkat efektivitas kerja pegawai yang baik melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan yang ada di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta memperoleh memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Steers (2012,33) mengemukakan beberapa indikator yang berkaitan dengan efektivitas kerja didalam organisasi yaitu ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu. Dari beberapa indikator tersebut jika dihubungkan dengan efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas maka dapat diketahui bahwa efektivitas kerja yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas masih rendah. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. Fakta dilapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya efektivitas kerja para pegawai yaitu pertama, kualitas pegawai rendah terlihat dalam pembuatan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Proses pembuatan laporan sering mengalami ketidaksesuaian dengan standar aturan laporan yang berlaku, sehingga diperlukan perbaikan berkali-kali, hal ini juga membuat penyusunan laporan yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa perbaikan, pada kenyataannya diperlukan perbaikan. Kondisi ini disebabkan karena ketelitian dan mutu kerja pegawai yang rendah. Kedua, keterlambatan bekerja atau adanya pegawai yang kurang menghargai waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu yang cukup lama.

Berkenaan dengan ketepatan waktu, kehadiran pegawai merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang efektivitas kerja pegawai dalam

memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Begitu pula di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas beberapa pegawai terlambat 10 menit hingga 15 menit dan adapun pegawai yang pulang tidak tepat waktu serta ada pegawai yang pergi tanpa keterangan saat jam kerja berlangsung sehingga mengurangi efektivitas kerja pegawai. Berikut laporan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas pada bulan Januari 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Kehadiran PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas
Bulan Januari 2022

Keterangan	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-5
Cuti	-	-	-	-
Dinas	-	-	-	-
Izin/Sakit	2	1	8	3
Tanpa Keterangan	37	27	19	43
Telat	26	23	17	25
Tugas Belajar	-	-	-	-

(Sumber: Daftar Hadir PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2022)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada bulan Januari 2022 masih ada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan dan masih ada pegawai yang datang terlambat. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa dari jumlah 31 orang Pegawai Negeri Sipil, rata-rata pegawai mengalami keterlambatan masuk jam kerja. Tingginya tingkat keterlambatan ini akan mengurangi jumlah jam kerja yang dapat digunakan untuk penyelesaian program-program kerja dan tugas-tugas yang diberikan organisasi.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut sangat jelas pembagian kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Karena efektivitas kerja berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan harus menghasilkan sesuatu tujuan yaitu hasil yang optimal. Adapun efektivitas itu sendiri banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pembagian kerja. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013:265) bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi, meliputi: (1) struktur; (2) tujuan; (3) manusia; (4) hukum; (5) prosedur pengoperasian yang berlaku; (6) teknologi; (7) lingkungan; (8) kompleksitas; (9) spesialisasi; (10) kewenangan; (11) pembagian tugas.

Pembagian kerja berarti suatu pekerjaan yang harus diselesaikan, dipecah-pecah dalam sejumlah bagian dan langkah-langkah perencanaan. Setiap bagian dan langkah pelaksanaan dilakukan orang-orang yang berbeda keahlian dan tanggung jawab. Setiap orang melakukan kerja dengan spesialisasi dalam bagian-bagian dari suatu pekerjaan, tidak merupakan keseluruhan dari pekerjaan. Dengan demikian pembagian kerja yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang berarti juga efektivitas dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada faktor pembagian kerja karena faktor pembagian kerja sangat berkaitan dengan masalah efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

Berdasarkan survei penulis pada saat melaksanakan kegiatan observasi, penulis melihat prinsip-prinsip pembagian tugas yang diberikan Sekretaris

DPRD Kabupaten Sambas kepada para pegawainya telah terstruktur. Namun masih ada tumpang tindih tugas yang mengakibatkan inefisiensi suatu pekerjaan. Selain itu, terdapat kekosongan jabatan sebanyak satu sub bagian sehingga hal ini mengganggu dan membebani pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pegawai yang ada. Terkait dengan volume pekerjaan yang setiap saat bertambah sesuai tuntutan-tuntutan pekerjaan maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan. Kemudian, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas. Pentingnya pembagian kerja yang sesuai tugas pokok fungsi pegawai akan membuat pekerjaan semakin mudah dan masing-masing pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehingga pekerjaan akan cepat selesai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterlambatan bekerja yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu dan tidak tercapainya target yang ditetapkan
2. Beban kerja yang menumpuk akibat adanya kekosongan jabatan
3. Ketidaksesuaian antara keahlian dengan pekerjaan yang diemban

4. Penempatan pegawai kurang terfokus pada kebutuhan di masing-masing subbagian dan beberapa pegawai yang beban kerjanya satu dengan yang lainnya berbeda.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan masalah agar nantinya masalah tersebut hanya mengarah pada tujuan yang akan dicapai. Maka pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian maka dapat ditegaskan rumusan masalahnya, yaitu “berapa besar pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pembagian kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas
2. Mendeskripsikan efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas
3. Menganalisa pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan di program studi Ilmu Administrasi Publik kajian Manajemen Publik khususnya efektivitas kerja pegawai.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan sehingga menjadi pedoman agar kedepannya dapat meningkatkan efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.